





hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang dan menghindari riba.

3. *Barang (muslam fih)*. Barang yang dipesan harus disebutkan dengan jelas jenis, ciri-ciri, macam dan ukurannya, serta dapat diakui sebagai hutang, sehingga *muslam ilaih* berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada *muslam*. Objek akad merupakan komoditas yang lazim ada dipasaran, baik ketika melakukan akad ataupun disaat *delivery*. Hal ini untuk memastikan bahwa *muslam fih* dapat diserahterimakan tepat pada waktu yang diperjanjikan.
4. *Şigat*. Tujuan yang terkandung dalam *ijāb* dan *qābul* harus jelas dan sesuai, serta pelaksanaannya berada dalam satu majlis. Kata yang digunakan adalah *as-salam* atau *as-salaf*.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli *salam* ini telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Karena tidak syah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan. Selain itu kedua belah pihak, baik pihak *muslam* dan *muslam ilaih* juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim:





diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang yang diadakan juga harus selalu tersedia di pasaran, dan informasi mengenai karakteristik barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dalam praktek jual beli barang promo, pihak Sophie Martin mampu menyerahkan barang yang telah dipesan konsumen. Akan tetapi, karena minat konsumen yang begitu besar terhadap barang promo, maka ada beberapa konsumen yang tidak bisa mendapatkan barang yang telah dipesan. Dalam kasus ini, pihak Sophie Martin mengembalikan uang konsumen yang telah diterimanya di awal akad. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menawarkan barangnya, Sophie Martin telah menyebutkan ciri-ciri suatu barang dalam katalog promo. Secara tidak langsung, katalog merupakan syarat yang dijanjikan oleh Sophie Martin kepada konsumennya. Jadi, konsumen hanya bisa memesan sesuai dengan yang telah disediakan di katalog. Terkait masalah yang terjadi di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian barang terletak pada kualitas, warna, dan ukuran suatu barang, maka pihak Sophie Martin tidak menerima pengembalian suatu barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Dikarenakan Sophie Martin telah melaksanakan jual beli sesuai dengan perjanjian atau sudah sesuai dengan yang ada di katalog promo. Apabila konsumen merasa ada kekeliruan dari segi ukuran barang yang dipesan, maka hal tersebut merupakan ketidaksengajaan dari pihak Sophie Martin. Dan apabila







kepada konsumen berupa pengembalian uang apabila konsumen tidak menerima barang yang telah dipesannya. Pihak Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing juga telah memberikan informasi kepada konsumen mengenai karakteristik suatu barang yang dijualnya. Jadi, Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha.

UUPK telah menjelaskan bagaimana kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7, yang telah diuraikan dalam bab II. Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dalam bab II juga menguraikan tentang tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 dan 23, yang intinya adalah pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan wajib memenuhi jaminan sesuai yang diperjanjikan. Pihak Sophie Martin juga telah memenuhi hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf c, d, dan h UUPK. Hak-hak konsumen yaitu:

- Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.